

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dijelaskan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan dibentuk dengan memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.

Penyusunan laporan keuangan di sektor pemerintahan merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri guna mempertanggungjawabkan kinerja atau aktivitas keuangannya kepada publik. Laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan untuk memberikan informasi relevan mengenai keadaan atau posisi keuangan dalam suatu entitas pemerintah tersebut.

Hal penting terkait kualitas laporan keuangan adalah dengan adanya kepatuhan terhadap berbagai regulasi, prinsip, dan standar akuntansi yang dijadikan sebagai panduan dalam pembuatan laporan keuangan. Pemerintah perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah tersebut untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang dijabarkan melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami (Mahmudi, 2011).

Idealitas pelaporan keuangan pemerintah yang berkualitas seringkali bukan hal yang mudah dicapai dalam realitasnya. Setelah mendapatkan opini WTP atau (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK pada tahun 2019 atas LKPD Kota Bandung tahun 2018, BPK dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2019 melaporkan bahwa masih terdapat temuan atas laporan keuangan Kota Bandung yang secara nilai jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan tersebut terbagi menjadi kasus kelemahan SPI dan juga kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Tabel 1.1 Daftar Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Bandung

No	Entitas	Periode	Temuan		Rekomendasi	
			Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)
213	Kota Bandung	2018	30	6.525.899.367,62	81	6.525.899.367,62
		2019	20	35.278.090.799,29	57	35.278.090.799,29

Sumber: IHPS I Tahun 2019

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah diduga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memaparkan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri dan/atau pimpinan lembaga, wajib menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Sistem pengendalian internal sudah lama diterapkan pada tingkat kecamatan. Camat sebagai pemegang jabatan tertinggi pada Kecamatan merupakan pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan sistem pengendalian internal di lingkungan kecamatan itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2019 melaporkan kelemahan-kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang terjadi. Problematika lemahnya sistem pengendalian internal pada Kecamatan Arcamanik yaitu terkait penatausahaan aset tetap yang belum memadai. Masih terdapat aset tetap yang belum dapat diyakini nilai kewajarannya di Kecamatan Arcamanik dengan rincian berikut.

Tabel 1.2 Aset Tetap Yang Belum Dapat Diyakini Nilai Kewajarannya di Kecamatan Arcamanik

No	Aset Tetap	Nilai Temuan 2016 (Rp)	Nilai Temuan 2017 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	247.912.000,00	655.154.000,00
2	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	18.000.000,00	47.718.000,00
Jumlah		265.912.000,00	702.872.000,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan 2018 (data diolah)

Pada tabel diatas, berdasarkan tindak lanjut pada tahun 2017 yang dilakukan oleh pemerintah atas permasalahan aset tetap pada tahun 2016 dengan tahun

perolehan 1900, 2005, dan 2007 yang tidak dapat diyakini nilai kewajarannya pada Kecamatan Arcamanik aset tetap yang tidak diyakini nilai kewajarannya sebesar Rp 702.872.000,00.

Pada neraca pemerintah Kota Bandung per 31 Desember 2018 yaitu adanya kelemahan dalam penyajian saldo Aset Lain-lain yang menunjukkan adanya penambahan barang rusak berat yang belum dilakukan penghapusan di Kecamatan Arcamanik tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.3 Aset Dalam Kondisi Rusak Berat Yang Belum Dilakukan Penghapusan

No	OPD	Nilai (Rp) Tahun 2016	Nilai (Rp) Tahun 2017	Nilai (Rp) Tahun 2018
1	Kecamatan Arcamanik	4.400.000,00	1.717.708.538,00	730,355,538,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan 2019 (data diolah)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2018 tidak ada usulan penghapusan barang dalam kondisi rusak berat yang telah di reklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain kepada BPKA. Berdasarkan hasil cek fisik, barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan yang tersimpan di gudang Kecamatan Arcamanik per 31 Desember 2018 sebesar Rp 730,355,538,00.

Berdasarkan data dan fenomena tersebut, dimana ada dimensi dari sistem pengendalian internal yang belum terpenuhi. Dimensi tersebut adalah dimensi pemantauan dan dimensi kegiatan pengendalian. Dimensi pemantauan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit segera ditindaklanjuti. Kemudian dimensi kegiatan pengendalian dari sistem pengendalian

internal yang memastikan bahwa kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi (Mahmudi, 2011). Dengan fenomena permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik dalam hasil pemeriksaan tahun 2019 yaitu kelengkapan dokumen laporan keuangan yang kurang lengkap, data barang/aset yang kurang lengkap sehingga menyulitkan petugas dalam penginputan barang pada simda barang.

Berlandaskan pada uraian fenomena dan data diatas, maka peneliti merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang pentingnya sistem pengendalian internal yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah pada Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Judul yang diangkat oleh peneliti yaitu **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2018-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang sudah digambarkan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Meskipun sudah mendapatkan opini WTP namun temuan pada LKPD meningkat secara nilai pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya 2018.
2. Kepala OPD Kecamatan Arcamanik selaku Pengguna Barang belum maksimal dalam melakukan tanggungjawabnya dalam pengelolaan barang milik daerah.

3. Masih terdapat aset tetap yang belum dapat diyakini nilai kewajarannya berdasarkan atas temuan pada tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti secara keseluruhan pada tahun 2017.
4. Terdapat barang dalam kondisi rusak berat yang belum dilakukan penghapusan pada tahun 2018, serta tidak dilakukan usulan penghapusan selama tahun 2018 ke BPKA.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang sudah dideskripsikan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Untuk mencapai penyusunan yang sesuai dengan sasaran, penulis mewatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh penilaian risiko terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
5. Bagaimana pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?

6. Bagaimana pengaruh pemantauan terhadap kualitas alaporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan rumusan masalah merujuk kepada itu tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penilaian risiko terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemantauan terhadap kualitas alaporan keuangan pemrintah di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik Administrasi Publik, menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan serta memperkuat penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperluas kemampuan berpikir dan wawasan keilmuan khususnya dengan bidang yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

b. Untuk Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Arcamanik dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

c. Untuk Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam studi analisis bidang terkait kualitas laporan keuangan secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Berpikir

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah sebuah proses pengendalian yang ada dalam kegiatan suatu organisasi dari mulai pimpinan hingga seluruh pegawai yang terjadi secara berkelanjutan serta memberikan keyakinan untuk tercapainya tujuan suatu organisasi secara efektif serta efisien, laporan keuangan yang andal, perlindungan akan aset negara, dan kepatuhan akan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2011).

Sistem pengendalian internal mempunyai 3 (tiga) fungsi utama. Yang pertama, fungsi preventif yang berarti pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan atau bersifat pencegahan. Fungsi preventif ini dapat dilakukan dengan cara perbaikan sistem dan prosedur, perekrutan pegawai yang berkualitas, serta pembuatan SOP (*Standard Operating Procedures*). Yang kedua adalah fungsi detektif merupakan pengendalian untuk mengidentifikasi masalah setelah terjadinya permasalahan seperti pengecekan ada atau tidaknya kesalahan perhitungan. Yang terakhir adalah fungsi korektif yang artinya pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pengendalian yang sudah terjadi hal ini dilakukan seperti mem *back up* file dan dokumen (Mahmudi, 2011).

Penjelasan mengenai sistem pengendalian internal mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 944 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut peraturan tersebut SPI memiliki lima dimensi yaitu (Mahmudi, 2011:253) :

1. Lingkungan Pengendalian
Dimensi ini merupakan dimensi yang menjadi dasar dalam sistem pengendalian internal berkaitan dengan sumber daya manusia, moralitas, integritas, kejujuran, serta kompetensi. Penting bagi seluruh elemen dalam instansi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal.
2. Penilaian Resiko
Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi oleh organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Dengan memahami resiko, organisasi dapat mengambil tindakan pencegahan yang akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan organisasi, sehingga organisasi dapat menghindari kerugian yang besar.
3. Kegiatan Pengendalian
Dimensi ini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa arahan dari pimpinan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengendalian adalah upaya yang dilakukan untuk menegakkan pengendalian dan pengawasan operasional suatu instansi.
4. Informasi dan Komunikasi
Dimensi ini merupakan dimensi pendukung dari semua dimensi dalam sistem pengendalian internal. Informasi dan komunikasi memastikan bahwa seluruh pegawai bisa mendapatkan informasi yang dapat dikomunikasikan lagi antar pegawai atau kepada atasan. Dimensi ini memastikan adanya jalur komunikasi yang baik antar pegawai maupun dengan pimpinan serta lingkungan sekitar instansi.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
Pemantauan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memberi penilaian serta mengevaluasi kinerja dari waktu ke waktu serta memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit segera ditindaklanjuti.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) bisa terwujud secara optimal jika disertai dengan kemampuan sumber daya manusia yang mengerti mengenai pentingnya SPI. SDM menjadi kunci terlaksananya sistem pemerintah dapat berjalan dengan optimal. Aparatur pemerintah dituntut

memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya agar dapat mempertanggungjawabkan sumber daya publik yang dikelolanya.

Salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas dan transparansi publik yaitu adanya laporan keuangan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan terstruktur yang mempersiapkan untuk menentukan status keuangan serta transaksi yang telah terjadi dalam suatu entitas pelaporan. Setiap organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban dalam menyusun laporan keuangan OPD kemudian disatukan menjadi LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat apabila didalamnya memuat informasi yang berkualitas. Laporan yang berkualitas akan ditandai salah satunya dengan memperoleh opini dari BPK berupa WTP. Untuk mewujudkan laporan yang berkualitas sehingga mendapatkan opini baik dari BPK, laporan tersebut harus memenuhi karakteristik tertentu.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1136 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menyatakan laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni ukuran normatif yang harus diterapkan dalam informasi akuntansi agar mencapai tujuannya (Soleh dan Rochmansjah, 2010).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut (Soleh dan Rochmansjah, 2010:157) :

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bisa memengaruhi keputusan pengguna serta bisa dijadikan alat dalam mereview atau mengevaluasi masa lalu serta masa kini, dan dapat memprediksi masa depan.

2. Andal

Laporan keuangan dapat dikatakan andal jika bebas dari istilah yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap transaksi dengan jujur dan dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut bisa saja menyesatkan.

3. Dapat dipahami

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dengan bentuk dan istilah yang sudah disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna apabila dapat dibandingkan baik secara internal yaitu dengan laporan keuangan tahun sebelumnya serta dibandingkan secara eksternal yaitu dengan instansi lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Hubungan antara sistem pengendalian internal (SPI) dengan kualitas laporan keuangan adalah bahwa dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas perlu melalui tahapan yang ditentukan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah. sistem akuntansi pemerintah daerah mencakup SPI, dan kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh apakah pemerintah memiliki sistem pengendalian internal yang baik (Mahmudi, 2007).

Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen (yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah) dan variabel independen (yaitu sistem pengendalian internal). Gambar di bawah ini menunjukkan bentuk kerangka penelitian:

Gambar 1. 1 Kerangka Pikiran

